

**PENGARUH UPAH, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP  
KEMISKINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)*

*Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**NADIA ISLAMI**  
**15060105**

**JURUSAN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI  
PENGARUH UPAH, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP  
KEMISKINAN DI INDONESIA

Nama : Nadia Islami  
NIM/TM : 15060105/2015  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi

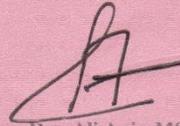
Padang, September 2019

Disetujui Oleh:  
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, MS  
NIP. 19591129 198602 1 001

Diketahui Oleh:  
Pembimbing



Drs. Ali Anis, MS  
NIP. 19591129 198602 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

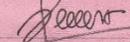
*Dinyatakan Lulus Setelah Diperhatikan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH UPAH, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP  
KEMISKINAN DI INDONESIA**

Nama : Nadia Islami  
NIM/TM : 15060105/2015  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Drs. Ali Anis, MS	1. 
2.	Anggota	: Dewi Zaini Putri, SE, MM	2. 
3.	Anggota	: Melti Roza Adry, SE, ME	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nadia Islami  
NIM / Tahun Masuk : 15060105 / 2015  
Tempat / Tanggal Lahir : Bangkinang / 28 Oktober 1997  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Pramuka Gg Sukarela, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, Prov. Riau  
No. HP / Telepon : 082389155090  
Judul Skripsi : Pengaruh Upah, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang,.....2019

Yang menyatakan



Nadia Islami  
NIM. 15060105

## **ABSTRAK**

**Nadia Islami 15060105/2015 : Pengaruh Upah, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Di Bawah Bimbingan Bapak Drs. Ali Anis, MS**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pengaruh Upah terhadap Kemiskinan di Indonesia. (2) Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia. (3) Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia. (4) Pengaruh Upah, Pendidikan dan Kesehatan secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder dalam bentuk data panel di 34 Provinsi di Indonesia kurun waktu 2012-2017. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Panel. Model yang terpilih adalah Random Effect Model.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. (2) Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. (3) Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Dari hasil penelitian disarankan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan penduduk yang tidak bekerja di sektor formal agar tetap mendapat pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya disarankan juga agar pemerintah dan instansi terkait dapat lebih meningkatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang dapat menunjang produktifitas masyarakat untuk bekerja.

**Kata kunci: Upah, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada dengan judul “*Pengaruh Upah, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia*” dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku pembimbing yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Orang Tua (Bapak Ir. Adi Imran dan Ibu Nani Yunita, S.Pd) yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas – fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku dosen pembimbing saya, Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM selaku dosen penguji (1) dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku penguji (2) yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini, serta karyawan dan karyawan yang telah membantu di bidang administrasi.
6. Tersayang penulis ucapkan kepada saudara sekandung Dini Hardiyanti, S.Psi dan Din Ahmad Najib serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabatku, partner makanku kemanapun dan teman sekelas hingga konsentrasi Mutia Rosadi yang telah banyak membantu dalam tugas perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
8. Sahabat tersayang yang udah seperti keluarga selama di rantau Dea Ayu Lestari, dan Helvyzanina Maryanti Putri yang selalu memberikan semangat dan setia mendengar keluh kesah selama penulisan skripsi ini, serta Yayan Hidayat yang telah banyak menghibur dikala stress dalam pengerjaan skripsi.
9. Teman-teman Kun Fayakun Squad yang juga ikut mendorong dan membantu penulis dalam memulai dan menyelesaikan skripsi.
10. Kepada teman satu pembimbing Cherrly Wahyuni yang selalu setia memberi kabar dan bimbingan bareng, serta Miftahul Hasanah teman bareng kekampus untuk bimbingan.
11. Untuk Adik-adik perantauan Nindia Nabilah Asrul, Silfia Ade Safitri, Putri Melati dan seluruh anggota IPMK-SB yang telah banyak memberikan canda tawa dan kebersamaan selama diperantauan.
12. Rekan-rekan keluarga besar Ilmu Ekonomi 15 tanpa terkecuali yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang tercinta, terabsurd yang telah membantu sedikit banyaknya perskripsian.
13. Teman-teman yang jauh dimata namun dekat dihati Aydia Suci Wulandari, Feby Dwiki Putri, Ikkal Habib, Alfin Kholis, Wahyu Alfayed dan Prana Surya Ramadhan yang selalu setia menunggu penulis untuk pulang dan mengajak keluar setiap penulis pulang.

14. Dan teman-teman, adik-adik, kakak-kakak lainnya yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Aamiin. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, ..... September 2019

Penulis

Nadia Islami

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	11
1. Kemiskinan .....	11
2. Faktor Penentu Kemiskinan .....	16
3. Upah dan Kemiskinan .....	17
4. Pendidikan dan Kemiskinan .....	20
5. Kesehatan dan Kemiskinan .....	23
B. Penelitian Relevan.....	26
C. Kerangka Konseptual .....	28
D. Hipotesis.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
C. Variabel Penelitian .....	31
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33

F. Definisi Operasional.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	35
1. Analisis Deskriptif .....	35
2. Analisis Induktif .....	36
H. Pengujian Hipotesis .....	43
1. Uji t-statistik .....	43
2. Uji F-statistik .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Penelitian .....	45
1. Kemiskinan di Indonesia .....	45
2. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia .....	46
3. Pengangguran di Indonesia .....	48
B. Deskripsi Variabel Penelitian .....	49
1. Deskripsi Perkembangan Kemiskinan di Indonesia .....	49
2. Deskripsi Perkembangan Upah di Indonesia .....	53
3. Deskripsi Perkembangan Tingkat Pendidikan di Indonesia .....	56
4. Deskripsi Perkembangan Tingkat Kesehatan di Indonesia .....	59
C. Analisis Induktif .....	62
1. Uji Pemilihan Model Data .....	62
2. Model Estimasi Regresi .....	64
3. Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	67
4. Pengujian Hipotesis .....	67
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	69
1. Pengaruh Upah terhadap Kemiskinan .....	69
2. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan .....	71
3. Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan .....	73
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
<b>LAMPIRAN</b> .....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2008-2017 .....	3
Tabel 1.2 Data Rata-rata Upah Minimum Provinsi, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup Penduduk di Indonesia Tahun 2008-2017 .....	6
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia tahun 2012-2017 .....	46
Tabel 4.2 Data Perkembangan PDB Indonesia tahun 2012-2017 .....	47
Tabel 4.3 Data Tingkat Penangguran Terbuka Indonesia tahun 2012-2017 ...	48
Tabel 4.4 Data Jumlah Penduduk Miskin Indonesia tahun 2012-2017 .....	51
Tabel 4.5 Data Upah Minimum Provinsi Indonesia tahun 2012-2017 .....	54
Tabel 4.6 Data Rata-rata Lama Sekolah Indonesia tahun 2012-2017 .....	57
Tabel 4.7 Data Angka Harapan Hidup Indonesia tahun 2012-2017 .....	60
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Uji Chow .....	63
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Uji Hausman .....	64
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Random Effect Model .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual .....	28
--------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia.

Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang ada di ASEAN, masalah kemiskinan bukan merupakan hal yang baru. Hampir semua periode pemerintahan yang ada di Indonesia menempatkan masalah kemiskinan menjadi isu pembangunan. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional. Artinya kemiskinan berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang besar meskipun dalam beberapa tahun terakhir angka resmi menunjukkan tren yang menurun sedikit demi sedikit. Sebagai kepulauan yang luas, karakteristik dan implikasi kemiskinan sangat bervariasi dari pulau ke pulau dan budaya ke budaya.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Pemerintah Indonesia yang berorientasi mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintah, inflasi, defisit anggaran dan lain-lain.

Para ekonom pembangunan menggunakan konsep kemiskinan absolute untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. (Todaro dan Smith, 2006).

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2008-2017**

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	Laju (%)
2008	15.42	-
2009	14.15	-8,24
2010	13.33	-5,80
2011	12.49	-6,30
2012	11.66	-6,65
2013	11.47	-1,63
2014	10.96	-4,45
2015	11.13	1,55
2016	10.70	-3,86
2017	10.12	5,42

**Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2018**

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi. Persentase penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 10,7 persen. Sedangkan laju persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2009 yakni menurun sebesar 8,24 persen. Penyebab turunnya angka kemiskinan ini adalah pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga lapisan terbawah terus tumbuh dan bantuan sosial dari pemerintah yang terus meningkat. Peningkatan upah buruh dan harga eceran beberapa bahan pokok juga menjadi penyebab turunnya angka kemiskinan (Detik finance, 17 Juli 2018).

Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi 11,13 persen. Hal ini meningkat sebesar 1,55 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena kenaikan harga bahan bakar minyak pada November 2014, inflasi periode September 2014 ke Maret 2015 terekam tinggi, dan harga beras juga

mengalami peningkatan. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan meningkat pada tahun ini disebabkan oleh lesunya perekonomian global yang mengakibatkan produksi pangan menurun sehingga menyebabkan harga barang-barang naik yang mengakibatkan inflasi meningkat. Dan berpengaruh kepada konsumsi rumah tangga yang menurun. (Kompas, 7 Februari 2016).

Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan hingga dibawah 10 persen. Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan modal manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pada upah juga diharapkan dapat memenuhi konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga pada akhirnya peningkatan upah dan modal manusia diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Diketahui sejak lama bahwa sekitar dua pertiga penduduk miskin di negara-negara berkembang masih menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil atau buruh tani yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, sepertiga penduduk miskin lainnya kebanyakan juga tinggal di pedesaan dan mereka hanya mengandalkan hidupnya dari usaha jasa kecil-kecilan, dan sebagian lagi bertempat tinggal di daerah-daerah sekitar atau pinggiran kota atau kampung-kampung kumuh di pusat kota dengan berbagai macam mata pencaharian seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, kuli kasar, atau dagang kecil-kecilan. (Todaro, 2006:269).

Kemiskinan dapat diatasi melalui upaya peningkatan pendapatan. Bagi penduduk yang bekerja sebagai pekerja, produktivitas pekerja dapat ditingkatkan melalui upah. Upah minimum provinsi atau yang biasa disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. UMP untuk setiap kabupaten/kota di suatu provinsi sama. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Menurut Kuncoro (2000:107), kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah. Pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang bertujuan agar warga negaranya mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat ketertinggalan dan keterbelakangan suatu daerah. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan meningkatkan produktivitasnya, karena ilmu dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan individu. Begitu pula dengan tingkat kesehatan. Semakin tinggi kesehatan seseorang, maka akan meningkatkan produktivitasnya untuk bekerja dan akan meningkatkan pendapatan individu. Tingginya pendapatan akan meningkatkan konsumsi mereka, dan dapat terhindar dari kemiskinan.

Fenomena yang terjadi adalah kenaikan pada upah biasanya akan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui peningkatan kesempatan dan kesejahteraan pekerja. Kenaikan upah akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja selagi pengusaha tidak semata-mata memandang upah tersebut sebagai biaya

produksi. Tetapi, memandang upah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi, kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap dan semakin meningkat kesejahteraan pekerja tentunya pada gilirannya akan menurunkan angka kemiskinan.

Permasalahan mengenai modal manusia yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di negara berkembang hampir serupa. Pada dasarnya, negara berkembang dihadapi oleh pilihan yang sulit antara memacu pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu atau meningkatkan modal manusia. Persoalan ini sulit diatasi, sehingga lebih merupakan sebuah lingkaran setan kemiskinan.

**Tabel 1.2**  
**Upah Minimum Provinsi, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup**  
**Penduduk di Indonesia Tahun 2008-2017**

Tahun	Upah Minimum Provinsi (Rupiah)	Laju (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Laju (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Laju (%)
2008	745.709	-	7,30	-	69,60	-
2009	841.530	12,85	7,40	1,37	69,75	0,22
2010	908.824	8,00	7,46	0,81	69,81	0,09
2011	988.829	8,80	7,52	0,81	70,01	0,29
2012	1.088.903	10,12	7,59	0,93	70,20	0,27
2013	1.296.908	19,10	7,61	0,26	70,40	0,28
2014	1.584.391	22,17	7,73	1,58	70,59	0,27
2015	1.790.342	13,00	7,84	1,42	70,78	0,27
2016	1.997.819	11,59	7,95	1,40	70,90	0,17
2017	2.072.604	3,74	8,10	1,89	71,06	0,23

**Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018**

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa rata-rata upah minimum provinsi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Laju terbesar terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar

22,17 persen. Pada tahun 2015, upah minimum provinsi meningkat, akan tetapi kemiskinan pada tahun ini juga mengalami peningkatan. Hal ini bertentangan dengan teori yang ada, yakni ketika upah meningkat, maka akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan menyebabkan kemiskinan menurun. Penyebab hal ini terjadi yaitu karena pertumbuhan yang sedikit menyerap tenaga kerja dan industri lebih memilih menggunakan mesin. Industri memilih menggunakan mesin karena iklim di pasar tenaga kerja Indonesia yang tidak kompetitif. Ini ciri utama yang menyebabkan pengangguran meningkat, dan kemiskinan juga meningkat. (Berita satu, 6 Januari 2016).

Kenaikan upah minimum bertujuan untuk memenuhi kehidupan yang layak untuk masyarakat dan juga agar konsumsi masyarakat meningkat. Meningkatnya konsumsi masyarakat ini juga bisa mendorong munculnya jenis-jenis usaha baru. Sehingga potensi terbukanya lapangan karyawan baru semakin besar. Adanya kemandirian masyarakat ini juga memperkuat ekonomi pribadi mereka, juga berdampak pada menguatnya perekonomian daerah secara keseluruhan. Adanya usaha baru ini juga akan menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2017 peningkatan rata-rata upah minimum provinsi hanya sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 3,74 persen.

Selain upah minimum provinsi, pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk juga diduga sebagai penyebab kemiskinan. Dapat dilihat pada Tabel 1.2 bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Sedangkan laju rata-rata

lama sekolah mengalami fluktuasi. Laju terbesar terjadi pada tahun 2017 yakni meningkat sebesar 1,89 persen. Sedangkan laju terendah terjadi pada tahun 2013 yakni hanya meningkat sebesar 0,26 persen. Pemerintah berupaya untuk selalu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang berada di atas usia 15 tahun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Cara yang paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut. Akan tetapi, mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. (Kompas, 8 November 2011).

Kesehatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dari tabel terlihat bahwa angka harapan hidup penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Dimana laju tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 0,29 persen. Hal ini disebabkan oleh penduduk Indonesia yang mulai memperhatikan kesehatan seperti menjaga makanan yang sehat, berolahraga serta menghindari kebiasaan yang dapat menimbulkan penyakit. Kenaikan pada angka harapan hidup ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Peningkatan pada kesehatan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kesehatan dan pendidikan merupakan modal manusia untuk dapat bekerja. Tingginya tingkat kesehatan seseorang menyebabkan produktivitasnya untuk bekerja juga tinggi.

Pada saat produktivitas bekerja yang tinggi, upah yang diterima juga akan lebih tinggi. Upah yang tinggi akan mengakibatkan konsumsi seseorang meningkat pula, sehingga terhindar dari kemiskinan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di provinsi di Indonesia?
2. Sejauhmana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi di Indonesia?
3. Sejauhmana pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di provinsi di Indonesia?
4. Sejauhmana upah minimum provinsi, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan di provinsi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di provinsi di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di provinsi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di provinsi di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian di harapkan berguna bagi:

1. Untuk pengembangan ilmu Ekonomi Publik, khususnya dalam mengambil kebijakan publik.
2. Untuk pengambil kebijakan yaitu seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Tenaga Kerja dan pengambil kebijakan lainnya.
3. Untuk peneliti lebih lanjut yang meneliti tentang Ekonomi Publik, khususnya tentang kebijakan upah minimum provinsi.
4. Bagi penulis, untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kemiskinan**

Menurut Bank Dunia (2000) kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Kesejahteraan sebagai penguasaan atas barang secara umum, sehingga masyarakat dapat menjadi jauh lebih baik bila mereka memiliki penguasaan yang lebih besar atas sumber daya. Secara khusus, kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi setiap individu dengan beberapa standar yang telah ditetapkan dimana mereka dianggap miskin apabila pendapatan atau konsumsi mereka berada dibawah standar tersebut (Haunghon & Shahidur, 2012:2).

Kesejahteraan adalah salah satu pendekatan yang diungkapkan oleh Amartya Sen (1987) yang berpendapat bahwa kesejahteraan berasal dari kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan atau mendapatkan pendidikan yang memadai, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak aman, memiliki kepercayaan diri yang rendah atau suatu perasaan tidak berdaya atau tidak memiliki hak seperti kebebasan berbicara. Bila demikian, kemiskinan merupakan sebuah fenomena multidimensional dan kurang diatasi dengan solusi yang sederhana (Haunghon & Shahidur, 2012:3).

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Kemiskinan bersifat multidimensional, yang artinya dimana kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki dua aspek, yaitu meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan. Aspek sekunder yaitu berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2004:237).

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. (Suryawati, 2004) mengemukakan keempat bentuk kemiskinan yaitu: Kemiskinan Absolut, Kemiskinan Relatif, Kemiskinan Kultural, dan Kemiskinan Struktural.

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan,

dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dapat kita amati melalui kondisi kehidupan masyarakat yang tidak merasakan perubahan. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi yang memadai sehingga masyarakat tidak dapat merasakan hasil dari pembangunan.

Menurut BPS (2008), berbagai masalah kemiskinan dapat dikelompokkan dalam *terminologi*, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut menurut BPS, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar yang dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Fakta dan fenomena kemiskinan dilatarbelakangi adanya perangkap kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Lingkaran setan kemiskinan yang terpenting adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi yang

ditentukan oleh tingkat tabungan untuk menanam modal. Pada negara sedang berkembang kedua faktor ini tidak mungkin dilaksanakannya tingkat pembentukan modal tinggi. Teori ini dikemukakan oleh Nurkse 1953 (Jhingan, 2012:33).

Menurut Nurske dalam Jhingan terdapat 2 lingkaran kemiskinan, yaitu:

1) Dilihat dari sisi Penawaran

Bahwa rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah akan menyebabkan kemampuan menabung masyarakat rendah. Kemampuan menabung yang rendah ini akan menyebabkan kekurangan modal, modal yang rendah akan menyebabkan investasi yang rendah. Investasi yang rendah menyebabkan tingkat produktivitas rendah, serta meningkatkan angka kemiskinan.

2) Dilihat dari sisi Permintaan

Di negara-negara miskin, faktor pendorong untuk menanamkan modal sangat rendah karena keterbatasan luas pasar untuk beragam jenis barang. Hal tersebut disebabkan pendapatan masyarakat yang rendah sehingga tingkat produktivitasnya pun juga rendah, karena diakibatkan dari pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal (investasi) yang terbatas inilah menyebabkan kekurangan faktor pendorong untuk menanamkan modal dan seterusnya.

Menurut Todaro dan Smith (2006:414), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan karena interaksi antara 6 karakteristik berikut yakni:

- 1) Tingkat pendapatan nasional di negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan per kapita di negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami *stagnasi*.
- 3) Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata.
- 4) Mayoritas penduduk di negara berkembang harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
- 6) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan dan kurang memadai untuk pelajar.

## **2. Faktor Penentu Kemiskinan**

Ditemukan banyak pemikiran/pandangan para ahli tentang faktor penyebab kemiskinan. Kuncoro (2004:120) mengemukakan bahwa:

- 1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya akan menimbulkan distribusi pendapatan tidak merata. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang

pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena masih rendahnya Pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), bahwa penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan, oleh karena itu, upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf dan peningkatan keterampilan penduduknya, kelima hal itu adalah suatu upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang berkaitan erat dengan kemiskinan, maka sangat diperlukan modal untuk dapat membangun sumber daya manusia tersebut agar tidak terjebak dalam jurang kemiskinan. Perbaikan sumber daya manusia dalam pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan sebuah kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia.

### **3. Upah dan Kemiskinan**

Dalam teori ekonomi pengertian upah dilihat dari dua pihak. Pertama pihak pengusaha, upah merupakan pembayaran atas jasa-jasa fisik atau mental yang disediakan oleh tenaga kerja. Kedua pihak tenaga kerja, upah merupakan imbalan jasa

fisik atau mental yang diberikan oleh pengusaha. Dari pengertian tersebut maka upah berperan penting dalam menentukan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Upah yang diberikan oleh pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal ini maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu :

- a. Upah nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.
- b. Upah riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut (Sukirno, 2008:351).

Penetapan kebijakan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman (social safety net) dimaksudkan agar upah tidak terus merosot sebagai akibat dari ketidakseimbangan pasar kerja (disequilibrium labour market). Juga untuk menjaga agar tingkat upah pekerja pada level bawah tidak jatuh ke tingkat yang sangat rendah karena rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasar kerja. Agar pekerja pada level bawah tersebut masih dapat hidup wajar dan terpenuhi kebutuhan gizinya, maka dalam penetapan upah minimum mempertimbangkan standar kehidupan pekerja. Kebijakan penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diarahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selain memberi jaminan pekerja/buruh penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penetapan upah minimum dipandang perlu sebagai salah satu bentuk perlindungan upah, dengan tujuan :

- 1) Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, yang menyebabkan pekerja menerima upah di bawah tingkat kelayakan.
- 2) Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungannya.
- 3) Sebagai jaring pengaman untuk menjaga tingkat upah
- 4) Menghindari terjadinya kemiskinan absolut pekerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar pekerja.

Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah saat ini masih banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah (propinsi atau kabupaten/kota) dan secara nasional. Kebijakan tersebut perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun dari segi mikro seiring dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan terutama perluasan kesempatan kerja. Peningkatan produksi, peningkatan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya.

Perbedaan kondisi setiap daerah akan membawa implikasi pada kebijakan dan pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Kebijakan pembangunan suatu daerah akan disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Undang-undang tersebut akan menyebabkan penetapan upah yang berbeda-beda. Idealnya, pembentukan upah dapat diselesaikan sendiri oleh mekanisme pasar. Interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah keseimbangan dan sebaliknya peningkatan penawaran akan menurunkan tingkat upah. Pada tingkat upah

tersebut kesepadanan antara kuantitas yang diminta dengan yang ditawarkan, oleh karenanya akan selalu terjadi. (Kuncoro, 2002:54)

Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman, 2000).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jundi (2014) menemukan bahwa semakin meningkatnya upah minimum akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada gilirannya mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, upah minimum memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkatnya upah minimum dalam masyarakat maka akan mengurangi kemiskinan yang ada.

#### **4. Pendidikan dan Kemiskinan**

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Pertama, materi yang dihasilkan dan dibagi. Kedua, masalah manusia yang menjadi manusia pembangunan. Para ahli ekonomi memang berbicara tentang SDM atau sumber daya manusia. Tetapi pembicaraan tentang manusia disini lebih menekankan aspek keterampilan. Dengan demikian, masalah manusia dilihat sebagai masalah teknis untuk peningkatan keterampilan, melalui bermacam sistem Pendidikan (Budiman, 2000:14).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan sebagai proses budaya akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti keimanan dan ketakwaan, moral, disiplin dan etos kerja, yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa. Salah satu indikator untuk mengukur pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (years of schooling). Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan seseorang (Todaro dan Smith, 2003).

Terdapat beberapa jalur pendidikan di Indonesia menurut UU No 20 Tahun 2003, yakni :

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang memiliki struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Adapun jenjang-jenjang pendidikan formal yakni:
  - 1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

- 2) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
  - 3) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan secara sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kepemudaan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan oleh Keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil dari pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Para akademisi berpendapat bahwa adanya keterkaitan antara pendidikan dan kemiskinan. Menurut Jundi (2014) semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka semakin besar kemampuan dan kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan yang lebih baik sehingga akan terhindar dari kemiskinan yang ada. Semakin tinggi pendidikan suatu individu, maka keahlian serta pengetahuan juga meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas individu tersebut. Perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih banyak, sehingga perusahaan bersedia memberikan upah yang lebih tinggi. Akhirnya seorang individu yang memiliki produktivitas tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik sehingga dapat terhindar dari kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat maka semakin kecil kemiskinan yang ada dalam masyarakat.

## **5. Kesehatan dan Kemiskinan**

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun

masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas.

Mills dan Gilson (1990) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
- 2) Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- 3) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.
- 4) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
- 5) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Variabel-variabel yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan di suatu daerah umumnya terdiri dari:

- 1) Tingkat Kesakitan Penduduk

Tingkat keluhan penduduk terhadap kesehatannya, dimana semakin banyak jumlah keluhan ini maka semakin buruk kesehatan di daerah tersebut.

## 2) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan gambaran jumlah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta beserta kapasitas tempat tidurnya. Selain itu juga menjelaskan jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan posyandu.

## 3) Angka Harapan Hidup

Penduduk yang hidup berumur panjang umumnya memiliki tingkat kesehatan yang baik. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

## 4) Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan menggambarkan jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan dan perawat.

Arsyad (2016) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi

kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Oleh karena, itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

## **B. Penelitian Relevan**

Alessandra S Brito dan Celia L Kerstenetzky (2018) dalam penelitian yang berjudul “Has the minimum wage policy been important for reducing poverty in Brazil? A decomposition analysis for the period from 2002-2013”. Penelitian ini menganalisis kontribusi kebijakan valorisasi upah minimum terhadap pengurangan kemiskinan yang terjadi pada dekade pertama abad ke-21 di Brasil, dengan mempertimbangkan tidak hanya insiden kemiskinan tetapi juga intensitas dan tingkat keparahannya. Antara tahun 2002 dan 2013, upah minimum berkontribusi pada penurunan 38,2% dalam proporsi orang miskin, penurunan 39,4% dalam intensitas kemiskinan dan penurunan 40,6% dalam keparahan kemiskinan. Hasil kami juga mengungkapkan perbedaan geografis, dengan upah minimum lebih penting di wilayah termiskin. Perbedaan dengan penelitian saya ialah tempat penelitian. Keunggulan penelitian ini ialah dilakukan di Indonesia yang termasuk negara sedang berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dengan upah yang diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Bhowi Dewananda (2018) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015”. Penelitian ini menggunakan metode ordinary least square (OLS). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret lintang (cross-section data) yang meliputi provinsi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel Upah minimum berpengaruh signifikan dan variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah, pada penelitian saya meneliti lebih luas yakni kemiskinan di Indonesia.

Restu Ratri Astuti (2015) dalam penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004 – 2012”. Analisis data diolah dengan menggunakan analisis data panel dengan model regresi random effect. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari persamaan regresi dan nilai koefisien determinan ( $R^2$ ). Hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin periode 2004 – 2012. Keunggulan

penelitian saya ialah meneliti pengaruh upah yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

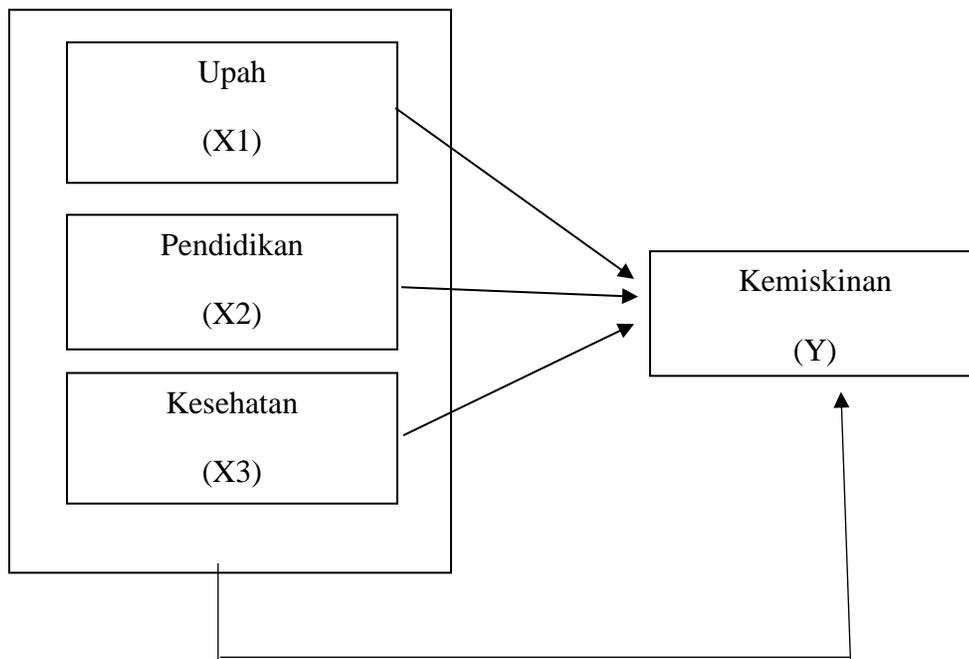
### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai kerangka berfikir untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menampilkan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan Batasan dan rumusan masalah dengan berpijak pada kajian teori diatas. Keterkaitan antara variabel yang diteliti adanya pengaruh antara variabel independen yang menggunakan upah minimum provinsi (X1), pendidikan (X2), dan tingkat kesehatan (X3) serta perannya dalam mempengaruhi kemiskinan (Y).

Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi upah yang diberikan, maka kemiskinan akan menurun. Upah minimum provinsi merupakan sejumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak terkait dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari pentapan upah minimum adalah mewujudkan penghasilan yang layak dari pekerja.

Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Pendidikan merupakan pembelajaran yang didapat baik dari sektor formal ataupun informal. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan semakin banyak, sehingga kualitas sumber daya manusia akan meningkat pula. Sumber daya manusia yang baik akan menyebabkan upah meningkat dan kemiskinan menurun.

Kesehatan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Kesehatan merupakan keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang diupayakan melalui tindakan menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sehingga bisa hidup produktif dan mempunyai tenaga yang sebaik-baiknya. Tingginya tingkat kesehatan seseorang akan meningkatkan produktivitas untuk bekerja yang akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang akan menurun.



**Gambar 2.1 Kerangka konseptual  
(Pengaruh Upah, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di  
Indonesia)**

#### **D. Hipotesis**

1. Upah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara upah, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisiennya } \beta \neq 0$$

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Panel yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh upah, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia selama enam tahun periode penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upah berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Peningkatan pada upah akan mengakibatkan penawaran tenaga kerja menurun. Penurunan pada pasar tenaga kerja akan mengakibatkan pengangguran meningkat. Hal ini tentu akan menyebabkan angka kemiskinan meningkat.
2. Pendidikan berhubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Pendidikan yang tinggi yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang akan mempengaruhi produktifitas untuk bekerja meningkat pula. Saat produktifitas bekerja tinggi, pendapatan yang akan diterima akan tinggi. Ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
3. Kesehatan berhubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Tingkat kesehatan seseorang menjadi dasar untuk menilai seberapa besar kemampuannya untuk bekerja. Tingginya kesehatan

seseorang akan membuat seseorang mampu bekerja dan menyebabkan produktivitas untuk bekerja tinggi. Tingginya produktivitas bekerja tentu akan mengakibatkan pendapatan yang diterima akan tinggi juga. Sehingga konsumsi seseorang meningkat dan terhindar dari kemiskinan.

4. Upah, pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya hubungan yang positif antara upah minimum provinsi terhadap kemiskinan, diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan tenaga kerja sehingga tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar pengangguran tidak meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.
2. Diharapkan pemerintah meningkatkan lagi pendidikan dan kesehatan yang ada di Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat merubah atau menambah cakupan penelitian, seperti jumlah sampling dan variabel-variabel yang digunakan sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah peneliti buat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen. 2004. *Statistik 1*. Padang: UNP.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Astuti, Restu Ratri. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012. Skripsi. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2008). Konsep Kemiskinan. Jakarta.
- Berita Satu. 2016. Ekonomi: Ini Penyebab Angka Kemiskinan RI Meningkat. Diunduh 6 Januari 2016. Tersedia pada <https://www.beritasatu.com/ekonomi/338515/ini-penyebab-angka-kemiskinan-ri-meningkat>
- Brito, A S dan Kerstenetzky C L. 2018. Has the minimum wage policy been important for reducing poverty in Brazil? A decomposition analysis for the period from 2002-2013. Paper No S1517-7580(18)30081-X. Brazil.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Detik Finance. 2018. Ekonomi Bisnis: Kepala Bappenas Beberkan Penyebab Angka Kemiskinan Turun. Diunduh 17 Juli 2018. Tersedia pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4119919/kepala-bappenas-beberkan-penyebab-angka-kemiskinan-turun>.
- Dewananda, Bhowi. 2018. Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Skripsi. Indonesia.
- Dwi, Kurnia. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2006-2013. Skripsi. Indonesia.
- Ekananda, M (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Mitra Wacana Medis: Jakarta.